

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1.1 Hasil dan Pembahasan

1.1.1 Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS)

Salah satu program bantuan hibah dari Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berwujud kepedulian terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang rumahnya tidak huni. Awalnya terbentuknya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini pada tahun 2014 dengan alasan melihat banyaknya rumah tidak huni pada tahun sebelumnya sebesar 5.012 yang tersebar diseruluh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai selatan.

Program ini merupakan bentuk keprihatinan dari Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di laksanakan pada tahun 2014 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023 yakni harus memperbaiki sebesar 5.012 Rumah, dengan harapan program ini dapat meretas atau mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjadikan masyarakat lebih nyaman dalam bertempat tinggal dan melaksanakan kegiatan lainnya dengan memiliki bangunan rumah yang layak untuk dihuni oleh rakyat.

Pelaksanaannya hibah ini sudah memperbaiki rumah sebanyak 6.077 bangunan rumah yang tidak layak untuk dihuni sampai dengan tahun 2023 dengan mengeluarkan kisaran biaya sebesar Rp 87.707.780 disajikan pada 4.1 oleh peneliti ialah :

Tabel 4. 1 Realisasi PRS di Tahun 2014 - 2021

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angkinang	52	117	-	119	14	20	23	19
2.	Daha Barat	50	-	-	45	10	30	20	44

3.	Daha Selatan	71	79	59	44	41	45	57	59	T O T A L		
4.	Daha Utara	93	-	-	23	25	32	37	21			
5.	Kalumpang	78	-	-	38	19	60	32	53			
6.	Kandangan	103	77	336	17	59	4	35	57			
7.	Loksado	59	32	129	31	21	37	82	62			
8.	Padang Batung	60	48	197	80	21	49	104	102			
9.	Simpur	70	62	177	26	73	56	80	59			
10.	Sungai Raya	83	215	-	22	71	53	83	92			
11.	Telaga Langsung	70	117	-	254	7	24	22	41			
Jumlah		790	747	888	761	378	410	575	611		5.160	Rp 71.765.280.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari table 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2021 Pemerintah Daerah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sebesar 5.160 rumah yang sudah diperbaiki dan setiap penerima bantuan hibah menerima bantuan uang dengan total Rp 13.908.000 untuk memperbaiki rumah yang rusak. Dari tahun 2014 sampai dengan 2021 Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan uang melalui APBD dengan total Rp 71.765.280.000 untuk dapat memberikan bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) kepada masyarakat miskin dan kalau kita lihat Pemerintah Daerah sudah memenuhi target yang sudah di cita-citakan yakni 5.012 rumah sedangkan Pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2021 sudah melebihi target yang ingin di capai yakni 5.160.

Mengingat walaupun target dari capaian Program Rumah Sejahtera sudah tercapai sebelum tahun 2023 Pemerintah Daerah tetap melanjutkan sampai dengan tahun 2022 yakni dengan menambahkan bantuan tersebut

yang dulunya sebesar Rp 13.908.00 menjadi Rp 17.500.000 dan dapat memperbaiki rumah sekitar 911 rumah dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 15.942.500.000 yang dilampirkan pada 4.2 oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Realisasi PRS di Tahun 2022 - 2023

N0	Kecamatan	2022	2023		
1.	Angkinang	43	46	T O T A L	
2.	Daha Barat	33	21		
3.	Daha Selatan	41	61		
4.	Daha Utara	40	56		
5.	Kalumpang	40	44		
6.	Kandangan	40	60		
7.	Loksado	35	29		
8.	Padang Batung	36	47		
9.	Simpur	38	48		
10.	Sungai Raya	40	56		
11.	Telaga Langsung	35	30		
Jumlah		413	498	911	Rp 15.942.500.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dapat dilihat pada table 4.2 bahwa kenaikan jumlah bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) yakni Rp 17.500.000, dan dapat dilihat pada tahun 2022 sampai tahun 2023 Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial sudah berhasil memperbaiki rumah tidak layak huni sebanyak 911 rumah atau kalau dinominalkan sebanyak Rp 15.942.500.000 yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Program bantuan hibah yang dilaksanakan oleh Pemda melalui Dinas Sosial yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu

yang memang mempunyai bangunan rumah tidak layak untuk dihuni. Di mana besar harapan hadirnya program ini dapat memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu dalam memperbaiki bangunan rumah yang tidak layak huni seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Jadi pelaksanaan program ini awalnya dimulai dari kepedulian pemerintah akan masyarakat yang tidak mampu atau kurang beruntung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah kurang lebih 5.012 rumah. Nah jadi dengan adanya 5,012 rumah tersebut sebagai komitmen dan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (dalam hal ini Bupati), oleh karena itu maka lahirlah program dalam menangani akan pemenuhan rumah layak huni untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Jadi dibuatlah Program Rumah Sejahtera (PRS) yang dibuat mulai tahun 2014 sampai saat ini 2 priode masa pemerintahan beliau.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Riduansyah (Subkunjaman Sosial Dinas Sosial) yakni :

“Berdasarkan pemamparan dari Pak Bupati dahulu, PRS ini diperuntukkan untuk menyentuh ke masyarakat miskin. Meningkat program dari kementerian itu lebih ketat syarat-syaratnya, jadi diciptakanlah PRS. Karena kalau di program kementerian itu tidak segampang PRS, walaupun rumahnya sudah sangat rusak tetapi tidak masuk data di pusat kemiskinan itu tidak bisa. Lalu akhirnya pemda melahirkan program rumah Sejahtera untuk membantu masarakat miskin dalam memperbaiki rumah yang tidak layak huni. “(Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Program Rumah Sejahtera (PRS) ini ialah program Pemda yang dilaksanakan sejak tahun 2014 yang di targetkan selesai pada tahun 2023. Program ini juga diharapkan untuk dapat merentas angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mencukupi kebutuhan dasar masyarakat miskin serta memiliki tempat tinggal yang layak huni agar mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mila (Koordinator Tim Samping Desa Kecamatan Padang Batung) yaitu :

“Kalau untuk target setahu saya tidak ada, target itu tergantung kouta saja. Jadi di Kabupaten itu ada 144 desa, tidak bisa semua teratasi dalam pemenuhan rumah layak huni. Tapi yang prioritas saja missal, anaknya tidak memiliki pekerjaan, rumahnya hancur, kemungkinan 5-10 tahun tidak terbangun rumah. Ada jua terdapat rumah hancur tapi perhiasan emas banyak. Jadi tergantung kejelian kami sebagai samping desa dan kepala desa dalam memilah KPM untuk mendapatkan PRS ini, karena yang mendapatlan bantuan program ini aslinya harus orang yang tidak mampu.” (Hasil wawancara tanggal 17 September 2023)

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Nordiansyah (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Untuk sementara kemungkinan dipastikan selesai, sesuai dengan target pada tahun 2014 akan tetapi itu tergantung data baru nantinya. Terkait kelanjutan program itu merupakan wewenang pimpinan, tetapi yang pasti kami berusaha sebaik mungkin agar program dapat selesai tepat waktu dan sesuai target. Setelah 5.012 rumah ini selesai, kami akan melakukan penyisiran ulang untuk memastikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak huni tahun 2023.” (Hasil wawancara 27 September 2023)

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Sosial, TKSK, dan Samping Desa serta masyarakat sangat berpengaruh dalam kegiatan PRS ini. Seperti yang dijelaskan oleh Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Jadi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini itu terdiri dari potensi kami atau perpnajangan tangan dari Dinas Sosial yang ditempatkan di seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Contoh: Samping Desa, TKSK, dan Masyarakat mereka memiliki perannya masing-masing dalam ikut mensukseskan program ini baik itu dalam menerima keluhan, mendata kelapangan, bagian monitoring dan evaluasi mendampingi dinas.” (Hasil Wawancara tanggal 25 Oktober 2023)

Hadirnya Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harapannya dapat memberikan sebuah membantu kepada masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kehidupannya yakni sebuah bangunan rumah layak untuk dihuni mengingat masih banyak masyarakat yang berlatarbelakang keluarga kurang mampu yang masih belum mempunyai rumah layak untuk dihuni. Hal itu juga diperjelas dari wawancara hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengan Bapak Sirajuddin (TKSK Kecamatan Padang Batung) yaitu :

“Yaa untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu rumahnya tidak layak huni, apalagi di Kecamatan padang Batung sekarang ini masih banyak rumah yang tidak layak huni apalagi se- Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. (Hasil Wawancara tanggal 17 September 2023)

Pelaksanaan Kegiatan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini menggunakan beberapa prinsip, yaitu gotong royong, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, professional, dan keberlanjutan.

A. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS)

Pelaksanaan Kegiatan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini menggunakan beberapa prinsip sesuai dari , yaitu gotong royong, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, professional, dan keberlanjutan yakni :

1. Gotong royong

Prinsip gotong royong yang dilaksanakan dalam Program Rumah Sejahtera (PRS) ialah adanya bantuan warga sekitar dan dibantu oleh salah satu tenaga ahli (tukang) yang mempuni di bidangnya dalam melakukan proses Pembangunan rumah atau rehab

bangunan rumah. Seperti halnya yang diterangkan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Nah jadi sebenarnya salah satu prinsip dari PRS ini merupakan gotong-royong, jika dananya tidak cukup diharapkan ada partisipasi desa atau masyarakat sekitar untuk membantu tenaga atau memberikan dana kepada KPM. Jadi penggunaan dana tersebut benar-benar diusahakan cukup dan KPM harus bisa mengatur keuangan agar dana tersebut cukup untuk memperbaiki rumahnya.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023).

Berbeda dengan pernyataan diatas, faktanya di lapangan rata-rata tidak sesuai dengan napa yang ingin diharapkan. Kebanyakan masyarakat hanya menggunakan jasa tukang tanpa adanya gotong royong. Seperti yang dikatakan Ibu Mirna (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Padang Batung) yaitu :

“Dalam memperbaiki rumah kami yang rusak kami menggunakan tukang, karena kami tidak bisa mengerjakannya, suami saya juga lumpuh jadi tidak bisa ikut membantu tukang dalam memperbaiki rumah kami.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023).

Hal yang sama juga disampiakan Ibu Sarah (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Loksado) yaitu :

“Dikerjakan menggunakan upah tukang, karena kami tidak bisa mengerjakannya.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Berdasarkan hasil temuan sebuah wawancara dan temuan penelitian saat dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa prinsip gotong royong ini belum sesuai yang diharapkan pada pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingat rata-rata masyarakat masih mengandalkan jasa tukang dalam memperbaiki rumahnya.

2. Kesetiakawanan

Prinsip kesetiakawanan yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) sangat berkaitan erat dengan prinsip gotong royong. Kesetiakawanan adalah sebuah kepedulian sosial terhadap orang yang sedang membutuhkan bantuan dengan rasa kasih sayang dan empati. Prinsip kesetiakawanan ini diharapkan adanya saling tolong-menolong antara masyarakat melalui Program Rumah Sejahtera (PRS) seperti yang disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yakni :

“Prinsip kesetiakawanan ini memang untuk memancing stimulant masyarakat atau KPM dalam membantu masyarakat tidak mampu karena merupakan tanggung jawab Bersama.”
(Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Kepedulian sesama antar masyarakat yang kurang mampu dapat diwujudkan melalui prinsip kesetiakawanan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Basrah (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Kandangan) yaitu :

“Dananya memang tidak cukup akan tetapi, sisanya dibantu keluarga saya dengan berhutang.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Bapak Marjuki (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Kalumpang) yaitu :

“Dalam proses perbaikan rumah kami yang rusak itu, sedikitpun kami tidak dibantu oleh warga sekitar ataupun keluarga. Kami disini hanya mengandalkan tukang saja.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Berdasarkan uraian yang sudah dideskripsikan dari hasil sebuah wawancara, maka prinsip kesetiakawanan tidak berjalan sesuai harapan yang tertuang pada pedoman pelaksanaan Program Rumah

Sejahtera, karena Keluarga Penerima Manfaat masih mengandalkan tenaga tukang.

3. Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip pelaksanaan yang ada di Program Rumah Sejahtera (PRS) yang mengacu pada aspek pemerataan, seimbang dan tidak adanya diskriminasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan prinsip ini sepenuhnya terpenuhi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Setelah proses sosialisasi kami mengarahkan semua potensi kami yakni samping desa untuk membantu KPM kita dalam proses pembelian bahan untuk perbaikan rumah dan menyari tuang agar KPM tidak terlalu terbebani. Untuk setiap 1 minggu kami juga meminta kepada samping desa untuk melihat bagaimana proses Pembangunan dan untuk mencari tahu kendala atau masalah yang terjadi di lapangan sehingga kalau ada kendala di lapangan bisa langsung ditindak lanjuti”. (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Zahra (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Daha Selatan) yaitu :

“setelah uang sudah di transfer via bank saya langsung didampingi oleh samping desa untuk membeli perlengkapan dan mendapatkan arahan lebih lanjut pada setiap minggu.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Ibu Basrah (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Kandangan) yaitu :

“dalam proses Pembangunan kami selalu dikunjungi oleh samping desa setiap minggunya untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada kami.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Dengan temuan seperti ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan ini berjalan sesuai dengan amanah yang tertuang di pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) karena pada prosesnya pelaksanaannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selalu didampingi oleh sarjana pendamping desa.

4. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu prinsip pelaksanaan yang ada di Program Rumah Sejahtera (PRS) dengan memastikan dan memerhatikan sebuah kegunaan serta fungsi yang ada dari keadaan bangunan rumah yang akan di renovasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sam'ani (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Angkinang) yaitu :

“Kami sangat bersyukur sekali alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah kami yang dulunya bocor sekarang sudah tidak lagi, dan rumah kami sekarang juga sudah punya kamar mandi yang dulunya kami tidak punya dan untuk mandipun kami sekeluarga harus ke sungai untuk mencuci ataupun mandi. Harapannya Semoga masyarakat yang lainnya juga dapat bantuan ini.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Zahra (Keluarga penerima manfaat Kecamatan Daha Selatan) yaitu :

“Dulu rumah kami sangatlah rendah, kalau air dalam pasti selalu banjir. Sekarang setelah mendapat bantuan pemerintah rumah kami Syukur alhamdulillah tidak banjir lagi.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Program Rumah Sejahtera memberikan begitu banyak manfaat kepada Keluarga Penerima Manfaat salah satunya dapat memperbaiki rumah warga penerima bantuan tersebut dilampirkan pada 4.1 oleh peneliti seperti:



Gambar 4.1 Before After Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Rumah Sejahtera (PRS)

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari Gambar 4.1 Menunjukkan sebelum warga menerima manfaat dari Program Rumah Sejahtera (PRS) rumah warga tidak mempunyai pelataran dan sering terjadi banjir serta akses jembatan yang kurang memadai. Setelah menerima bantuan tersebut rumah warga tampak terlihat untuk layak dihuni. Hal yang lain juga

disampaikan oleh ibu Ana (keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Telaga Langsat) yaitu :

“Dulu rumah kami selalu kebanjiran ditambah rumah itu dulu menggunakan kayu biasa dan berdindingan triplek jadi mudah retak atau rusak (japuk) sehingga kalau hujan deras terjadi kebocoran ataupun rembes itu sudah menjadi hal biasa. Tapi setelah menerima bantuan ini alhamdulillah rumah kami sekarang menjadi tinggi dan dinding-dinding rumah kami sudah ditutupi dengan kayu bukan triplek lagi.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Melihat dari temuan sebuah wawancara dan hasil sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, Prinsip kebermanfaatan dalam Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sangatlah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS). Program ini juga mendapat suatu respon positif dari masyarakat mengingat program ini sangat bermanfaat bagi keluarga miskin yang menerima bantuan program tersebut.

5. Keterpaduan

Salah satu prinsip pengintegrasian berbagai komponen merupakan prinsip yang tertuang pada keterpaduan yang di mana prinsip ini untuk dapat memaksimalkan dana bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) melalui sinergi dan koordinir. Implementasi dari sebuah bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) dapat terkoordinir dengan baik dengan adanya petugas pelaksana di lapangan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yakni :

“Dalam pelaksanaan PRS ini banyak sekali yang terlibat seperti potensi kami atau perpanjangan dari Dinas Sosial yang ditempatkan di desa-desa dan di kecamatan, contohnya : samping desa dan TKSK perkecamatan. Mereka memiliki peranan masing-masing, ada yang menerima keluhan, ada yang

mendata kelapangan, ada yang monitoring dan evaluasi mendampingi dinas.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Data yang nantinya masuk akan ditampung melalui data base usulan yang nantinya akan diverifikasi dan kami sampaikan ke samping desa, TKS di kecamatan yang akan melakukan verifikasi. Kami juga melakukan verifikasi lapangan walaupun tidak semuanya karena terlalu luas.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Prinsip Keterpaduan yang tertuang dalam panduan pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) pada implementasinya sudah berjalan sesuai dengan seharusnya yang mengacu pada pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS), walaupun tidak semua desa mendapatkan verifikasi langsung dari Dinas Sosial akan tetapi Dinas Sosial sudah mewakili hal tersebut kepada samping desa dan KTSK di kecamatan masing-masing.

6. Kemitraan

Dalam pelaksanaan program ini adanya dorongan dari sebuah kemitraan, khususnya kepada CSR dan Bank ikut serta membantu dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini bekerja sama dengan beberapa pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“jadi dalam pelaksanaan PRS ini dana kita serahkan tunai tapi via tabungan (bank). Jadi kita fasilitasi KPM untuk dapat buku tabungan kemudian difasilitasi oleh bank untuk tiap kecamatan.

Kita kerja sama dengan bank, nanti bank langsung menyalurkan kepada KPM.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkum Jaminan Sosial Dinas Sosial) yakni :

“Ya, karena bantuan ini diserahkan melalui via transfer rekening. Jadi kami meminta pihak Bank untuk membuat buku rekening pada setiap KPM khususnya bank Kalsel.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Nordiansyah (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

“PRS ini tidak hanya menggunakan dana APBD saja tetapi ada dana bantuan dari pihak lain (CSR) seperti Bank Kalsel, Bank BRI dan PLN pernah memberikan dana bantuan kepada KPM dengan nominal yang sama yakni Rp 17.500.000.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Hasil temuan pada sebuah wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Program ini bekerja sama dengan pihak Bank dalam proses penyaluran bantuan agar nantinya penerima manfaat dapat mengambil bantuan secara langsung ke rekening yang sudah dibuat untuk menerima uang bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) dan dana CSR yang pernah diberikan oleh Bank BRI, Bank Kalsel dan PLN kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah yang sama yakni Rp 17.500.000. Prinsip kemitraan ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena dengan adanya bantuan dari pihak Bank akan mempermudah keluarga penerima bantuan hibah pada saat proses penyaluran dana bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS)

7. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sangat berkaitan dengan bagaimana pihak

pelaksana dapat menampung keluhan masyarakat ataupun dari segi transparansi bantuan yang disalurkan. Dalam menampung aspirasi dari masyarakat, pihak Dinas Sosial telah menyediakan wadah akan hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Riduansyah (Subkunjaman Sosial Dinas Sosial) yakni :

“Jadi yang terlibat atau terjun langsung di lapangan adalah potensi kami yakni sarjana pendamping desa, yang langsung memberikan arahan serta menampung masukan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan apabila ada kendala yang terjadi di lapangan sarjana pendamping desa langsung mengkoordinasikannya kepada kami. Disamping itu kami juga selalu menerima masukan dan kritik langsung di Dinas Sosial maupun di sosial media resmi kami” (Hasil wawancara tanggal 25 september 2023)

Sementara untuk proses penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) uang tersebut disalurkan melalui transfer rekening Bank dan ada jaminan bahwa dana yang disalurkan tersebut transparan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Ya bantuan ini disalurkan melalui transfer rekening. Jadi tidak ada kesempatan bagi tim untuk mengambil uang tersebut dan apabila masyarakat penerima manfaat tersebut uasiannya sudah tua (lansia), nah disitulah peran samping desa dalam membantu dan mendampingi pihak KPM dalam membeli bahan bersema keluarga terdekat. Karena kalau diserahkan kebeliau langsung kasian. Bukannya membantu malah menambah beban KPM tersebut, takutnya beliau ditipu oleh penjual” (Hasil wawancara tanggal 25 september 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Murni (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Sungai Raya) yaitu :

“benar sekali saya mendapatkan uang tersebut melalui via tranfer Bank kalsel tanpa ada dipotong sedikitpun yakni 17.500.000 dan kami dibantu juga dalam membeli papan dan

mencari tukang untuk memperbaiki rumah kami yang rusak”
(Hasil wawancara 1 September 2023)

Hasil penelitian dari peneliti menunjukkan bahwa, prinsip keterbukaan ini berjalan sesuai dengan amanat yang tertuang pada pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima uang bantuan tersebut melalui via transfer bank yang dapat mereka cek dan ambil langsung untuk memperbaiki rumah mereka.

8. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahap awal sampai akhir. Dalam hal ini pihak pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) di lapangan harus melakukan pelaporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan dengan bukti yang valid. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nordiansyah (Kepala Dinas Sosial) yakni :

“Sesuai Perbub itu untuk proses pelaporan pelaksanaan PRS ini selambat-lambatnya yakni tanggal 31 desember disetiap tahunnya. Karena kita tidak bisa memberikan tekanan kepada masyarakat supaya cepat karena ada faktor kendala seperti bahan, tukang dan cuaca. Yang penting kami dari Dinas Sosial memberikan arahan kepada samping desa dan masyarakat agar tidak memunda-nunda Pembangunan/perbaikan sesuai dengan instruksi Bupati Hulu Sungai Selatan dan biasanya dari tim pelaksanapun akan memberikan deadline maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan pelaporan PRS ini” (Hasil wawancara tanggal 27 september 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Ibu Latifah (Samping Desa Kecamatan Sungai Raya) yakni :

“Karena masyarakat banyak memiliki kesibukan masing-masing jadi tidak menutup kemungkinan banyak proses rumah ditunda dan kami sebagai samping desa tidak bisa memaksakan untuk agar cepat-cepat selesai. Sehingga biasanya kami berdiskusi dengan KPM untuk menambahkan jumlah tukang agar proses cepat selesai dan laporan juga cepat terselesaikan.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yakni :

“Sesekali Bapak Bupati juga mengikuti Verifikasi rumah calon KPM PRS dan ikut juga dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa bersama kami untuk melihat langsung keadaan di lapangan.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Sajian sebuah temuan wawancara dan hasil sebuah penelitian yang dijalankan oleh peneliti, maka prinsip akuntabilitas program ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan walaupun ada kendala dalam pelaksanaan di lapangan seperti keterlambatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memperbaiki rumahnya, akan tetapi sudah teratasi karena biasanya dari tim pelaksana selalu memberikan *deadline* 1 bulan sebelum pelaporan pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS).

9. Partisipasi

Pada prinsip partisipasi ini implementasi berdasarkan pada dengan keikutsertaan sebuah unsur dari masyarakat yang termasuk juga dalam dunia usaha dengan tujuan mempergunakan berbagai sumber daya yang sudah dimiliki. Pada pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak hanya membantu masyarakat tidak mampu yang memiliki bangunan rumah tidak layak untuk di huni akan tetapi, mendayagunakan para penjual kayu maupun toko bahan

bangunan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irham (Samping Desa Kecamatan Daha Selatan) yaitu :

“setelah proses penyerahan dana bantuan dilaksanakan, kami selaku samping desa mendampingi KPM untuk mengantarkan dalam membeli bahan bangunan tersebut agar sesuai dengan rincian yang ada di juknis. Biasanya disetiap kecamatan memiliki kerja sam dengan bahan bangunan dan pengrajin kayu agar harganya lebih murah dan barang yang dibelipun bagus serta berkualitas.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Hal yang beda juga disampaikan oleh Bapak Hanafi (Keluarga Penerima Manfaat Daha Utara)

“Saya dibawa oleh samping desa ke toko banguna dan tukang kayu untu membeli dan memesan barang-barang diperlukan dalam memperbaiki rumah saya yang rusak” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Namun tidak semua masyarakat mau menerima bantuan dari samping desa untuk diarahkan dalam membeli perlengkapan yang direkomendasikan dalam memperbaiki rumah. Ada juga mereka membeli barang sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mery (Samping Desa Kecamatan Daha Utara) yaitu :

“Dana bantuan Rp. 17.500.00 itu sebenarnya sangatlah cukup kalau untuk rehab saja. Mengingat pesan Pak Bupati dan itu digunakan untuk membeli bahan-bahan yang berkualitas terbaik. Karena masyarakat ada yang berbeda pemikiran ada saja yang ingin menghemat dan dengan membeli bahan dengan bukan kuliat terbaik agar dapat barannya lebih banyak dan mereka memilih sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan masyarakat selagi uang tersebut digunakan sesuai dengan yang kami arahkan.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Melihat dari temuan sebuah hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka sebuah prinsip partisipasi pada pelaksanaan ini diarahkan dan ditunjukkan dapat mendayagunakan pihak-pihak lain sudah berjalan sesuai pada pelaksanaannya.

10. Profesional

Pada sebuah Prinsip professional adanya implementasi melalui pengorganisasian yang terstruktur dalam sebuah dipertanggungjawabkan secara wajar. Professional pelaksanaan Program rumah Sejahtera (PRS) berdasarkan dengan juknis yang dibuat oleh Dinas Sosial kabupaten yang diungkapkan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yakni :

“dari awal ya tahapan pelaksanaan itu sudah tertuang seperti di juknis, jadi kami disini bekerja berdasarkan aturan.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang berbedapun juga disampaikan oleh Ibu Marli (Samping Desa Kecamatan Simpur)

“Pada proses pelaksanaannya kami berusaha bersifat netral untuk memastikan KPM benar-benar masyarakat miskin tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga baik Dinas ataupun Kepala Desa tersebut agar penerima benar-benar masyarakat miskin.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti maka, prinsip profesionalitas dalam pelaksanaan Program rumah Sejahtera sudah berjalan dengan semestinya sesuai juknis yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

11. Keberlanjutan

Pada aspek sebuah keberlanjutan dari Program yang dilaksanakan memiliki harapan salah satunya adalah dengan adanya program komplementaritas Program Rumah Sejahtera (PRS). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nordiansyah (Kepala Dinas Sosial) yaitu :

“Bansos ini juga ada komplementaritas. Komplementaritas ini artinya setelah rumah sudah diperbaiki, KPM tidak dibiarkan sampai disitu saja. Ada beberapa program lain yang di mana bisa masuk untuk memenuhi kebutuhan dasar KPM. Salah satunya RASTARDA, jadi kalau dirumah itu memang memenuhi kriteria masuk RASTARDA. Selain RASTARDA tadi ada juga bantuan seperti Usaha Ekonomi Produktif, kalau didalmnya ini ada warga yang memiliki usaha walaupun usahanya tidak besar tetap masih kita bantu dengan catatan asalkan KPM yang berusia produktif.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Ibu laila (Keluarga Penerima Manfaat Daha Barat) yaitu :

“ada kemaren saya diberikan bantuan modal untuk usaha, karena saya tidak punya modal lebih untuk berdagang kecil-kecilan.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sarah (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Loksado)

“ada kami diberikakan beras dari pemerintah 1 karung dan berupa uang tunai case.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Kabupaten Hulu Sungai Selatan) terkait keberlanjutan dari Program yaitu :

“Jadi untuk PRS ini sudah di anggar kan di tahun 2024 untuk di tahun 2025 kami dari dinas memasukkan program ini di Smart City untuk menjamin program ini masuk dalam program prioritas karena program ini sudah banyak menorehkan prestasi dan disetiap kabupaten juga memiliki program hal yang sama cuman ada beberapa perbedaan saja. Walaupun nantinya kebijakan akan final diambil oleh pimpinan yang baru entah nanti akan mempelajari kembali terkait program ini. Jadi program ini akan kami pertahankan karena sangat berdampak terhadap masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Dalam pelaksanaannya Prinsip keberlanjutan sudah sesuai dengan pedoman yang ada dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yang di mana masyarakat tidak dilepaskan begitu saja oleh Dinas Sosial tetapi ada keberlanjutannya agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki potensi untuk bekerja akan diberikan pemberdayaan dari Dinas Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lansia atau penyandang disabilitas yang tidak mampu lagi dalam bekerja akan mendapatkan bantuan. Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga akan berlanjut ditahun 2024 dan akan dimasukkan serta dipertahankan untuk dilanjutkan kembali dikepemimpinan Kepala Daerah yang baru ditahun 2025 mendatang.

B. Tahapan Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS)

Implementasi pada proses ini memiliki lima tahapan dalam pelaksanaannya yaitu verifikasi proposal, identifikasi calon penerima manfaat, sosialisasi program, Pembangunan rumah dan monitoring & evaluasi.

1. Verifikasi Proposal

Verifikasi Proposal Program Rumah Sejahtera (PRS) merupakan tahapan awal dari proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS). Diaman melalui pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yakni :

- a. Tulang punggung sebuah keluarga tidak mempunyai mata pencaharian atau memiliki pekerjaan
- b. Tidak mempunyai aset lain Ketika dijual masih belum memenuhi kebutuhan khalayak hidup keluarga selama tiga bulan terkecuali aset berupa tanah dan bangunan rumah yang ditempati.
- c. Harus mempunyai sertifikat kepemilikan lokasi tanah bagi rumah yang didiami.
- d. Sungai, air tadah hujan merupakan sumber air keluarga
- e. Kayu bakar, minyak tanah, kompor gas bantuan subsidi merupakan bahan bakar memasak
- f. Memiliki keadaan rumah yang tidak layak untuk dihuni sebagai berikut :
 - i. Bahan bangunan mudah rusak
 - ii. Berlantaikan tanah dan kayu yang rusak
 - iii. Luas bangunan kurang dari 8 m² perorang;

Selanjutnya untuk kriteria dan persyaratan penerima bantuan dari Program Rumah Sejahtera (PRS) adalah:

- a. Apabila terpenuhinya dari salah satu dari kriteria tersebut di atas.
- b. Keluarga miskin yang belum memiliki rumah sendiri (bukan sebagai prioritas), adapun Program Rumah Sejahtera dengan prioritas sebagai berikut:
 - i. Kepala keluarga adalah usia lanjut atau tidak produktif yang tidak memiliki keluarga.
 - ii. Kepala Keluarganya adalah wanita, dan mempunyai tanggungan lebih dari 2 orang (lebih diprioritaskan kepada yang lebih banyak tanggungannya), dan tanggungannya yang masih sekolah.

- iii. Ada anggota keluarganya sebagai penyandang disabilitas (penyandang cacat)
- iv. Kepala Keluarga /Anggota Keluarga Miskin yang dianggap ditelantarkan oleh keluarganya.

Setelah sudah memenuhi kriteria berikut maka calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan atau Proposal
- b. Pas Photo Ukuran 4X6
- c. Gambar Objek Rumah
- d. Menyertakan sebuah Foto copy KTP
- e. Menyertakan Sebuah Foto copy KK
- f. SKTM
- g. Surat Rekomendasi dari Camat
- h. Surat Kepemilikan/Penguasaan Tanah.

Di mana masyarakat akan mengantarkan proposal kepada samping desa sesuai persyaratan tersebut yang nantinya data tersebut akan masuk ke dalam data Dinas Sosial yang sudah mendapatkan tanda tangan atau persetujuan Kepala Desa masing-masing. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) mengatakan bahwa :

“Nah, jadi yang pertama itu ada usulan data, bisa datang langsung atau melalui Samping Desa, atau Kepala Desa. Data yang masuk biasanya akan kami tampung dan seleksi lagi sesuai prioritas dan latar belakang keadaan KPM. Agar yang menerima benar-benar membutuhkan bantuan ini, jika dianggap layak maka akan kami buat SK penetapan penerima bantuan (SK Bupati). nah biasanya usulan data tersebut akan direalisasikan 1 tahun kedepan dan selambat-lambatnya 2 tahun sesuai APBD yang keluar tiap tahunnya.”
(Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rani (Samping Desa Kecamatan telaga Langsat) mengenai proses atau tahapan dari Program Rumah Sejahtera (PRS) :

“Jadi begini, pertama harus ada usulan data (Proposal) baik dari masyarakat atau Kepala Desa. Lalu data tersebut akan kami sampaikan ke Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah itu dilaksanakan verifikasi untuk mengetahui apakah KPM sudah memenuhi kriteria, nah biasanya verifikasi dilakukan dua kali yang pertama dari kami samping desa dan Kepala Desa dan yang kedua dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau secara khusus oleh Bidang Jaminan Sosial yang membawahi PRS ini.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Dalam proses verifikasi tim pelaksana melaksanakan verifikasi atau melihat langsung keadaan calon Keluarga Penerima Manfaat yang dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu oleh Samping Desa di awal dan berikutnya dari Dinas Sosial dalam hal ini Bidang Jaminan Sosial berikut hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat cermati pada 4.2 yang ingin ditunjukkan oleh peneliti sebagai berikut :

Gambar 4. 2 Hasil Verifikasi Rumah



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pada gambar 4.2 menunjukkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama tim pelaksana untuk mengidentifikasi rumah warga yang memiliki kerusakan dengan berbagai macam. Proses ini merupakan proses tahapan awal sebelum tim pelaksana menyeleksi siapa saja yang memenuhi kualifikasi dari dinas yang berhak dalam mendapatkan bantuan hibah. Hal yang lain juga disampaikan oleh Bapak Irham (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Daha Selatan) yaitu :

“saya waktu itu menyerahkan proposal permohonan dibantu oleh Kepala Desa pada tahun 2021. Setelah menyerahkan kalau tidak salah 2 minggu atau lebih rumah kami didatangi oleh tim Dinas Sosial Bersama Kepala Desa juga untuk melihat keadaan rumah kami yang rusak ini dan kalau tidak salah kami baru mendapatkan kabar 1 bulan lagi kalau kami akan menerima bantuan ini di tahun yang akan datang yakni 2022.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Untuk tahapan proses verifikasi proposal berjalan sesuai dengan amanat yang tertuang pada pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yakni harus ada usulan dari calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Kepala Desa baru dilaksanakannya proses verifikasi oleh Sampung Desa dan Dinas Sosial terkhusus Bidang Jaminan Sosial yang memang membawahi Program Rumah Sejahtera (PRS). Setelah proses Verifikasi baru dari Dinas Sosial akan mengumumkan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima Program Rumah Sejahtera (PRS) setelah proses verifikasi kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Identifikasi Calon Penerima Manfaat

Proses Identifikasi kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan dengan melihat secara sosial, ekonomi dan pendekatan lainnya dan harus memenuhi kriteria dari Dinas. Dalam

proses identifikasi calon penerima manfaat Program Rumah Sejahtera (PRS) tim pelaksana berusaha sejeli mungkin untuk menyeleksi calon penerima manfaat tersebut agar tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Rani (Samping Desa Kecamatan Telaga Langsat) yakni :

“Nah, dalam proses Identifikasi misal terdapat 10 usulan, kami dan Kepala Desa akan memverifikasi 10 usulan tersebut, setelah diverifikasi maka terpilihlah 8 calon KPM setelah itu 8 tadi diverifikasi lagi oleh Dinas Sosial dan terpilih lagi 5 calon KPM nah biasanya saya sebagai samping desa dan Kepala Desa sudah sedikit mengetahui latar belakang calon KPM akan tetapi terkendala ada KPM yang memang tidak memiliki tanah (tanah pinjaman) mengingat hasl tersebut pernah terjadi di tahun 2015 lalu juga ditemukan calon KPM yang rumahnya tidak memiliki keruskan yang parah (masih layak huni).” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yakni :

“Karena PRS ini merupakan Program dari Bupati jadi masyarakat diberitahu tentang program ini. Jadi masyarakat melakukan usulan ke kantor desan nah disinilah tugas samping desa yang akan mencek langsung calon KPM. Jika yang mengusulkan 20 orang yang terpilih cuman 15 orang sedangkan kouta penerimaan bantuan di kecamatan tersebut cuman 5 maka 10 orang tersebut akan kami tampung di tahun berikutnya lagi dengan maksimal 2 tuhan dan 5 orang tersebut akan benar-benar dipilih sesuai prioritas kebutuhan dan kelayakannya.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Walaupun dalam prosesnya tim pelaksana sangat ketat sekali dalam memilih dan menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada hasilnya masih banyak ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak seharusnya dapat atau rumah tersebut masih layak untuk dihuni yang dapat dicermati dan dilihat pada 4.3 berikut :

Gambar 4. 3 Foto *before Aftar* PRS



Sumber : Temuan Peneliti

Dari gambar 4.3 di atas menunjukkan rumah yang pertama tidak mengalami kerusakan yang parah dan harus diperbaiki, apalagi untuk mendapatkan bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) sehingga

before after tidak terlalu jauh akan adanya perubahan hanya ditambahkan cat biru sehingga terkesan menjadi baru.

Sedangkan gambar yang di bawahnya rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memang mengalami kerusakan akan tetapi keluarga tersebut memiliki banyak tabungan untuk memperbaiki rumahnya sehingga dengan keadaan rumah sebelum menerima bantuan dengan sesudah diluar ekspektasi dari hasil yang jadi mengingat, dengan uang Rp 17.000.000 nihil sekali membangun rumah dengan bahan semir.

Berdasarkan hasil peneliti, maka tim pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) benar-benar mengidentifikasi secara detail mengenai calon Keluarga Penerima bantuan hibah. hal tersebut dimaksud agar penerima bantuan hibah tidak salah sasaran. Agar proses bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini benar-benar diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dengan melihat kriteria yang sudah ditentukan. Melalui pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) sesuai juknis yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat yang dilakukan oleh petugas sudah berjalan sesuai dan tepat sasaran. Tetapi ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya tidak menerima bantuan tersebut tetapi lulus verifikasi dari tim pelaksana.

3. Sosialisasi Program

Adanya implementasi sebuah pengarahan dilakukan dalam rangka untuk memberikan sebuah pemahaman kepada calon penerima bantuan hibah agar setiap gerak pelaksanaan yang dilakukan oleh penerima bantuan memiliki kesamaan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Dayat (Samping Desa Kecamatan Angkinang) mengenai proses sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Rumah Sejahtera (PRS) ini mengatakan bahwa :

“Ada, nah biasanya sebelum pencairan bantuan PRS kami akan memanggil KPM ke Kantor Desa untuk diberikan penjelasan terkait pelaksanaan PRS ini agar sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah.” (Hasil wawancara Tanggal 1 November 2023)

Hal yang lain juga diungkapkan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) mengenai proses sosialisasi kepada masyarakat yaitu :

“Jadi sebelum penyaluran itu kami mengadakan Bimtek (Bimbingan Teknis). Nah Bimtek ini merupakan cara kami untuk menjelaskan secara langsung kepada KPM terkait proses PRS ini dan juga biasanya Bapak Bupati juga hadir,” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Untuk memastikan bahwa sosialisasi ini memang benar-benar dilaksanakan oleh tim pelaksana Program Rumah Sejahtera (PRS), maka peneliti juga melakukan wawancara terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Samani (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Angkinang)

“Iya waktu itu saya dipanggil ke Kantor Desa untuk diberikan penjelasan terkait pelaksanaan bantuan PRS ini dan sebelum penyaluran dicairkan kami mengikuti Bimtek di Kantor Kecamatan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bapak Bupati.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Ibu Murni (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Sungai Raya) yaitu :

“Ada saya dijelaskan bahwa apabila dana bantuan PRS ini tidak cukup saya harus menggunakan uang pribadi karena dana bantuan tersebut diperuntukkan memperbaiki rumah yang rusak.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, proses sosialisasi Program Rumah Sejahtera (PRS) ini benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama tim

pelaksana di tempat penyaluran masing-masing untuk menjelaskan lebih lanjut kepada masyarakat terkait penggunaan dana bantuan yang diberikan agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan proses sosialisai dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar memahami mekanisme pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS).

4. Pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS)

Dalam proses pelaksanaan melakukan beberapa hal dalam prosesnya yakni :

1. Melakukan perancangan, perencanaan dan menentukan bagian bangunan rumah yang akan renovasi.
2. Memilih hal prioritas bagian bangunan rumah yang nantinya akan di renovasi
3. menentukan rincian bahan bangunan rumah serta besaran total
4. Melakukan pembelian sebuah bahan bangunan rumah.
5. Melaksanakan proses Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) yang di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menyelesaikan Pembangunan selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima dana bantuan Program.

Pelaksanaan pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan pada perosesnya. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan terkendalanya proses pelaksanaan pembangunan tidak sesuai target yang diharapkan salah satunya ialah keterlambatan proses pengerjaan rumah yang disebabkan sumber daya tukang dan pengelolaan dana bantuan hibah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mila (Samping Desa Kecamatan Padang Batung) yakni :

“Sebenarnya KPM diminta untuk menyelesaikan prosesnya selambat-lambatnya 1 bulan setelah uang dicairkan akan tetapi

ada salah satu KPM yang tidak ingin menyewa jasa tukang dengan alasan ingin menghemat uang tersebut sehingga proses Pembangunan PRS melebihi waktu yang sudah diarahkan oleh kami sebagai tim pelaksana.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ibu Laila (Keluarga Penerima Manfaat) yakni :

“Cukup lama sekitar 1,5 bulan karena tukang yang kita miliki harus bergantian karena mereka juga ada kerjaan di pihak lain sedangkan untuk menggunakan tenaga di rumah kami itu tidak bisa soalnya suami saya kena strok sejak 4 tahun yang lalu jadi kami tidak bisa apa-apa.” (Hasil wawancara tanggal 3 November 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka hasil peneliti terkait tahapan pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahapan awal sampai dengan proses sosialisasi kepada masyarakat sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembangunan ada beberapa hambatan yang dialami baik itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan samping Desa. Mengingat kurangnya sumber daya tukang yang dapat menghambat proses pembangunan dan proses laporan pertanggung jawaban. Selain dari keterlambatan yang disebabkan kurangnya sumber daya tukang dan pengelolaan dana, pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga tidak melaksanakan prinsip kesetiakawanan dan gotong royong dengan baik.

5. Monitoring dan Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Program Rumah Sejahtera (PRS) ini bersamaan pada tahap sebelumnya yang sudah

dijelaskan yakni bersamaan pada tahap pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) setelah berjalan 2 (dua) minggu setelah pendanaan cair. seperti yang disampaikan oleh Bapak Nordiansyah (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Setelah 2 (dua) minggu pelaksanaan PRS ini berjalan tim pelaksana akan melakukan kunjungan atau yang disebut sebagai monitoring dan evaluasi langsung kepada KPM. Untuk melihat sampai di mana progress pembangunan dan mencari tahu apakah dalam pelaksanaan KPM mengalami Kendal dll.” (Hasil wawancara tanggal 27 September)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Riduansayh (Subkunjungan Jaminan Sosial Dinas Sosial) mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS) yakni :

“Pada tahapan monitoring ini sering kita menemukan kendala yang dihadapi masyarakat selain kita mengetahui kendala dan mencarikan solusi kita sebagai tim juga akan melaksanakan evaluasi kepada KPM maupun Samping Desa terkait pelaksanaan PRS ini karena ada beberapa KPM yang tidak mau rumahnya di cat warna biru.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Melihat pada temuan dan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh peneliti, maka terkait pada tahapan pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahapan awal sampai dengan proses monitoring dan evaluasi kepada masyarakat sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembangunan ada beberapa hambatan yang dialami baik itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Samping Desa. Mengingat kurangnya sumber daya tukang yang dapat menghambat proses pembangunan dan proses laporan pertanggung jawaban. Selain dari keterlambatan yang disebabkan kurangnya sumber daya tukang dan pengelolaan

dana, pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga tidak melaksanakan prinsip kesetiakawanan dan gotong royong dengan baik.

B. Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS)

Proses evaluasi Program yang di analisis menggunakan kriteria evaluasi menurut Bardach yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan keuangan serta penguasaan administratif sebagai berikut :

1. Kelayakan Teknis

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan secara teknis dapat mencapai tujuan. Berdasarkan data dan hasil wawancara kepada tim pelaksana Program Rumah Sejahtera (PRS), program ini sudah berjalan sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 6.077 (enam ribu tujuh puluh tujuh) rumah berdasarkan data dan hasil wawancara dengan Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan) program ini ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan harus memperbaiki rumah tidak layak huni sebesar 5.012 unit bantuan.

Namun untuk dapat melihat tingkat kelayakan teknis dari suatu program sangat di pengaruhi oleh beberapa prinsip pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari program ini. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditepatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yaitu :

“Dari awal ya, tahapan itu sudah tertuang pada SOP atau JUKNI. Jadi kami bekerja sesuai dan berdasarkan aturan pada SOP dan JUKNIS. Bagi dari segi prinsip pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Namun, pada pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini tidak selamanya berjalan sesuai SOP ada beberapa pelaksanaan yang masih tidak dapat melaksanakan beberapa prinsip seperti prinsip

gotong royong dan kesetiakawanan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ana (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Telaga Langsat) yaitu :

“dalam melaksanakan perbaikan rumah kami saya hanya menggunakan jasa tukang tidak ada kegiatan gotong royong sama sekali antar warga mungkin karena mereka pasti sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Pada Prosesnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya sedemikian mungkin agar pada misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak huni, dengan selalu memberikan usaha semaksimal mungkin pada tahapan pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh Lea Indiarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) mengenai proses tahapan yang harus dilaksanakan tim pelaksana Program Rumah Sejahtera (PRS) yaitu :

“Saya jelaskan proses tahapan awal dari pelaksanaan PRS secara singkatnya begini 1) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Program Rumah Sejahtera 2) Mengajukan anggaran kepada Tim Anggaran Kabupaten dalam rangka untuk pelaksanaan Program Rumah Sejahtera 3) Melaksanakan sosialisasi kegiatan Program Rumah Sejahtera 4) Menerima, mengadministrasi dan menverifikasi data usulan calon penerima manfaat dari program 5) Melaksanakan verifikasi lapangan/penjajagan ke lokasi calon penerima bantuan Program Rumah Sejahtera 6) Merekomendasikan individu/keluarga calon penerima manfaat dari Program Rumah Sejahtera 7) Melaksanakan proses pencairan/penyalurkan dana bantuan Program Rumah Sejahtera 8) Membuat laporan kegiatan 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat 10) Melaksanakan monitoring serta evaluasi.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Dalam misi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan ditahun 2023 pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Seperti yang berbeda juga

disampaikan oleh Bapak Nordiaansyah (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

“PRS ini tidak hanya menggunakan dana APBD saja tetapi ada dana bantuan dari pihak lain (CSR) seperti Bank Kalsel, Bank BRI dan PLN pernah memberikan dana bantuan kepada KPM dengan nominal yang sama yakni Rp 17.500.000.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan perihal capaian dari Program Rumah Sejahtera (PRS) yang sudah melebihi harapan yang sudah ditargetkan pada tahun 2014. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nordiaansyah (Kepala Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Program ini sudah mencapai target yang ingin di capai pada tahun 2014 yaitu dengan memperbaiki rumah tidak layak huni sebesar 5.012 unit yang ditargetkan selesai dan kalau melihat data realisasi PRS sudah ada 6.077 unit rumah yang sudah diperbaiki. Selain itu juga PRS ini mendapatkan sebuah prestasi yang masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2020 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga pada pemerintahan daerah, BUMN dan BUMD.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Jika mengacu pada data rumah tidak layak huni yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 masih terdapat 6.884 bangunan rumah tidak layak untuk di huni. Berikut data bangunan rumah tidak layak untuk dihuni Se Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dapat dicermati pad 4.3 berikut :

Tabel 4. 3 Data RTLH Provinsi Kalimantan Selatan 2023

No	Kabupaten	RTLH
1.	Tanah Laut	439

No	Kabupaten	RTLH
2.	Kabupaten Kota Baru	2.496
3.	Kabupaten Banjar	2.409
4.	Kabupaten Barito Kuala	8.814
5.	Kabupaten Tapin	580
6.	Kabupaten HSS	6.884
7.	Kabupaten HST	3.982
8.	Kabupaten HSU	2.394
9.	Kabupaten Tabalong	1.887
10.	Kabupaten Tanah Bumbu	3.389
11.	Kota Banjar	4.671
12.	Kota Banjarmasin	497
13.	Kabupaten Balangan	3.273
Provinsi Kalimantan Selatan		41.714

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi KALSEL 2023

Jika mengacu pada data tabel 4.3 diatas maka, dengan masih banyaknya jumlah bangunan rumah tidak layak untuk di huni yang ada di Hulu Sungai Selatan sementara Program Rumah Sejahtera (PRS) yang di targetkan selesai ditahun 2023 tentunya belum terealisasi, karena masih ada bangunan rumah tidak layak untuk di huni sebanyak 6.884 bangunan rumah tidak layak untuk di huni menurut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Jika mengacu pada data diatas maka perlu ada tambahan bantuan sekitar 6.386 unit harus diberi bantuan oleh Pemda pada tahun 2023 guna tercapainya Kabupaten yang layak huni bersamaan pada berakhirnya sebuah Program Rumah Sejahtera (PRS).

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat perbedaan data bangunan rumah tidak layak untuk di huni antar Dinas Sosial dengan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, perbedaan data tersebut masing-masing memiliki kualifikasi tersendiri dalam menentukan rumah tidak layak huni. Untuk memastikan hal tersebut peneliti bersama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penyisiran kembali terhadap rumah tidak layak huni. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Riduansyah (Subkunjaman Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yakni :

“Beda, segmen dan kualifikasi kami adalah kluster paling bawah yang memang dengan kluster kerusakan paling parah. Kalau dari Dispera KPLH itu sifatnya berkelompok. Jadi ya tidak bisa masuk dalam kualifikasi kami namun calon KPM bisa saja dimasukkan dalam program kami.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Berdasarkan hasil temuan peneliti maka kelayakan teknis dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) sebenarnya sudah sepuh dengan melihat tercapainya target ditahun 2014 yang realisasinya ditahun 2023 walaupun pada pelaksanaannya ada beberapa prinsip yang tidak terlaksana yakni prinsip gotong royong, kesetiakawanan serta adanya temuan bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) yang tidak tepat sasaran. Padahal proses pelaksanaan pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) harusnya dapat membantu masyarakat miskin yang membutuhkan.

2. Kelayakan Ekonomi dan Keuangan

Indikator ini berkaitan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa manfaat (ekonomi dan sosial) yang akan diperoleh. Kelayakan ekonomi dan keuangan berhubungan dengan masalah pendanaan. Seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2021 total dari sebuah dana bantuan hibah Program Rumah Sejahtera sejumlah Rp 13.908.000 Dengan

jumlah bantuan dana tersebut tidak semua masyarakat yang menerima bantuan merasa cukup dalam membangun atau memperbaiki rumahnya untuk menjadi rumah layak huni. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya bisa memperbaiki Sebagian rumah saja, mereka harus melakukan perbaikan sendiri jika ingin memperbaiki secara keseluruhan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Lea Indarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“banyak sekali KPM yang ingin meminta adanya penambahan dana karena perbedaan gaji upah, kayu dan perlengkapan untuk memperbaiki rumah belum lagi yang didaerah rawa yakni kecamatan daha Selatan, daha barat dan daha utara yang di mana mereka harus memasang tajak (pondasi kayu yang lebih tinggi) karena daerah sana daerah rawa dan rawan banjir.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yakni :

“setelah beberapa tahun kami melaksanakan PRS ini hamper dari semua KPM meminta untuk menambahkan nominal bantuan karena untuk Rp 13.908.000 hanya bisa memperbaiki rumah saja tidak dengan upah tukang sehingga kami dari tim berusaha memperjuangkan untuk nominal penyaluran tersebut agar ditambahkan di tahun 2021.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Nordiansyah (Kepala Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Saya pada tahun 2021 Bersama tim pelaksana di DPR mengusahakan dan menyampaikan aspirasi terkit dana bantuan PRS ini agar kedepannya di tambahkan karena mengingat di tahun 2021 dengan nominal 13.908.000 sudah tidak cukup lagi dalam memperbaiki kerusakan rumah ditambah upah tukang yang semakin naik.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Berdasarkan hasil rapat tersebut maka dikeluarkanlah keputusan untuk menambahkan jumlah bantuan dana sebesar Rp 17.500.00 yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rincian yang dapat dicermati pada 4.4 berikut yang disajikan oleh peneliti :

Tabel 4. 4 Rincian Dana Program Rumah Sejahtera (PRS)

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Rumah	11.600,000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan)</i>	11,600,000
2	Peningkatan Kualitas MCK	2,500,000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan MCK)</i>	2,500,000
3	Pendukung	3,400,000
	<i>1. Konsumsi Gotong Goyong</i>	400,000
	<i>2. Upah Tukang (Bangunan induk dan MCK)</i>	3.000,000
JUMLAH TOTAL		Rp. 17.500.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bantuan hibah yang dulunya sebesar Rp 13.908.00 menjadi 17.500.000 pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3.592.000 yang diperuntukkan untuk membayar gaji sebuah tukang yang semakin tahun naik dan makanan gotong royong agar proses pembangunan Program dapat berjalan dengan lancar. Mengingat dana yang diberikan sebesar Rp

17.500.000 diperuntukkan hanya untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak saja. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“jadi dana yang dihibahkan sebesar Rp 17.500.000 itu hanya untuk memperbaiki rumah yang rusak saja, kalau ada uang sisa baru bisa dipergunakan ke lain seperti membuat WC dll kami pun sudah memberikan rincian dana yang nantinya akan menjadi pedoman KPM dalam memperbaiki rumahnya yang rusak.” (Hasil wawancara tanggal 25 september 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yaitu :

“pada waktu Bimtek kami sudah menjelaskan kepada KPM bahwa dana Rp 17.500,000 hanya cukup untuk memperbaiki rumah saja tidak untuk membangun rumah baru jadi saya Bersama tim pelaksana selalu mengingatkan kepada KPM mengenai pengelolaan dana bantuan tersebut agar dipergunakan sesuai dengan SOP dan JUKNIS.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Sedangkan untuk melihat kelayakan ekonomi dan keuangan berkaitan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa manfaat (ekonomi dan sosial) yang akan diperoleh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Marjuki (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Kalumpang Kalumpang) bahwa dana Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sangat cukup untuk memperbaiki rumahnya yang rusak yakni :

“dana PRS itu sangat-sangat cukup malah ada uang kemabli yang bisa membangun WC di belakang rumah yang dulunya kamar mandi kita di Sungai (jamban) kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah dan tim pelaksana yang sudah membantu kami dalam proses perbaikan rumah.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rani (Keluarga Penerima Manfaat Telaga Langsung) terkait kecukupan dana Program Rumah Sejahtera (PRS) ini yaitu :

“sangat cukup sekali dengan uang yang diberikan kepada keluarga kami yakni Rp 17.500.000 malah kami juga mampu untuk membeli perlengkapan tempat tidur dengan menggunakan uang sisa.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Dengan dana bantuan sebesar Rp 17.500.000 mampu memperbaiki bangunan sebuah rumah warga yang pada dulunya tidak layak untuk dihuni menjadi layak untuk dihuni yang dapat dicermati pada 4.3 disajikan oleh peneliti :

Gambar 4.3 Perbaikan Rumah Warga



Sumber : Temuan peneliti

Hasil dokumentasi dari peneliti merupakan gambaran keadaan rumah sebelum dan sesudah Keluarga Penerima Manfaat dari Program Rumah Sejahtera (PRS) dengan menggunakan bantuan dengan total Rp. 17.500.000, dalam memperbaiki keadaan rumah yang rusak.

Berdasarkan sajian dari hasil penelitian yang diuraikan , maka kelayakan dari segi ekonomi dan keuangan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sudah layak karena program ini memiliki prinsip dan tujuan yang memang diharapkan agar masyarakat menggunakan dana sehemat mungkin dan melakukan perbaikan di bagian rumah yang rusak saja selain itu juga keadaan rumah warga sebelum dan sesudah juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

3. Pengoperasian Administratif

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan dapat dilaksanakan (dengan ketersediaan SDM, fasilitas, dan waktu yang ada). Pelaksanaan Program dibantu oleh potensi desa yaitu Samping Desa yang tersebar di seluruh Kecamatan dan disetiap desa memiliki 1 Samping Desa yang siap memfasilitasi masyarakat terkait pelayanan pada di Dinas Sosial. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nordiaansyah (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Dalam pelaksanaan PRS ini kami sangat terbantu dan terwakilkan sekali oleh SDM kami yakni Samping Desa yang ada di seluruh desa yang berjumlah 114 baik dari tahapan verifikasi sampai dengan tahapan pelaporan dan evaluasi.”
(Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Ibu Mariam (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Simpung)

“dalam proses perbaikan rumah kami dari awal kami sangat terbantu sekali dengan adanya kehadiran Samping Desa yang membantu kami dari membeli perlengkapan perbaikan rumah sampai dengan mencarikan tukang yang di mana sempat tidak ada tukang di desa kami.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapa Riduansyah
(Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial)

“walaupun disetiap desa mempunyai 1 Samping Desa karena banyaknya tugas serta tuntutan kerja mereka yang banyak dalam pelaksanaannya sering terjadi kecolongan seperti adanya KPM membeli bahan perbaikan rumah dengan kualitas rendah dengan alasan untuk menghemat uang dan ada juga ditemukan KPM yang tidak menggunakan jasa tukang dengan alasan yang sama.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lea Indiarti
(Kepala Bidang Jaminan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
mengenai Samping Desa yaitu :

“mengingat banyaknya tugas Samping Desa di lapangan yang di mana mereka bukan mengurus tentang PRS ini saja melainkan semua pelayanan dan program yang ada di Dinas Sosial sehingga kami mengusulkan di priode Bupati selanjutnya agar menambah jumlah Samping Desa di setiap desanya ya minimal 2 agar mereka bisa roling.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Samping Desa pada tugasnya memiliki peranan penting dalam proses pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahap verifikasi sampai dengan evaluasi. Karena keterbatasan dan banyaknya jumlah pelayanan yang ada di Desa membuat Samping Desa Kewalahan dalam mengatur waktu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Latifah (Samping Desa Kecamatan Sungai Raya) yaitu :

“saya dan teman-teman samping desa lain sering sekali kecolongan terhadap KPM mengingat banyak nya tugas

kami di desa kami di tim Kecamatan biasanya juga saling bahu membahu dalam tugas monitoring walapun demikian tetap saja terjadi kecolongan dengan alasan karena lupa dan lain berbagai hal.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak terlepas dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya program. Kendala yang ditemukan seperti kurangnya ketersediaan tukang yang menyebabkan keterlambatan proses pengerjaan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Basrah (Keluarga Penerima manfaat Kecamatan Kandangan) yaitu :

“setelah uang cair kami harus menunggu tukang 2 minggu untuk dapat membantu suami saya dalam memperbaiki rumah sehingga dalam perbaikan rumah saya kemaren ada keterlambatan waktu kalau tidak salah 1 bulan 2 minggu.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan oleh Bapak Rio Wardana (Samping Desa Kecamatan Daha Barat) yaitu :

“1 bulan kalau bisa sudah selesai kalau pun ada keterlambatan 2 bulan sudah sangat maksimal bagi kami karena kami mewajarkan di mana kurangnya SDM tukang disetiap Kecamatan berbeda-beda mengingat kami dari tim harus membuat LPJ terkait pelaksanaan PRS ini jadi kami memaksimalkan pembangunan itu selesai selambat-lambatnya 2 bulan setelah uang cair.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti, indikator pengoperasian administratif tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti Kurangnya sumber daya samping desa yang mengakibatkan adanya KPM yang tidak tepat sasaran dan Kurangnya ketersediaan tukang yang tidak hanya berdampak pada keterlambatan proses pembangunan rumah, tetapi juga

menyebabkan petugas tidak dapat menyelesaikan laporan tepat waktu.

Melihat pada temuan dan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh peneliti, maka terkait pada tahapan pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahapan awal sampai dengan proses monitoring dan evaluasi kepada masyarakat sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembangunan ada beberapa hambatan yang dialami baik itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan samping Desa. Mengingat kurangnya sumber daya tukang yang dapat menghambat proses pembangunan dan proses laporan pertanggung jawaban. Selain dari keterlambatan yang disebabkan kurangnya sumber daya tukang dan pengelolaan dana, pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga tidak melaksanakan prinsip kesetiakawanan dan gotong royong dengan baik.

Jika dirangkum dari tahapan awal sampai proses akhir pelaksanaan Program Rumah Sejahtera dapat di gambarkan melalui Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4. 5 Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS)

NO	Kegiatan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
		Dinsos	Samping Desa	KPM			
1.	Verifikasi Proposal				Satu tahun sebelum pelaksanaan program	Diperolehnya data dari KPM yang nantinya akan direkapitulasi dalam buku data base sebagai acuan sasaran dan target dari program dan diintegrasikan dalam data-data PMKS	
2.	Indentifikasi Calon KPM				Setelah data calon KPM dari seluruh Kecamatan sudah terkumpul	Keluarnya hasil keputusan KPM dari tim pelaksana dalam hal ini pihak Dinas Sosil dan Samping Desa	
3.	Sosialisasi Program Rumah Sejahtera (PRS)				H-1 Sebelum Pencairan dana bantuan Program Rumah	kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Program	

NO	Kegiatan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
		Dinsos	Samping Desa	KPM			
					Sejahtera (PRS)	Rumah Sejahtera.	
4.	Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Rumah KPM				H + 1 Setelah dana keluar	Direnovasinya Rumah KPM menjadi Rumah Layak Huni	
5.	Monitoring dan evaluasi				2 minggu setelah pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS)	Memperudah KPM dalam menyelesaikan Renovasi	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.1.1 Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS)

Proses evaluasi Program yang di analisis menggunakan kriteria evaluasi menurut Bardach yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan keuangan serta penguasaan administratif sebagai berikut :

a. Kelayakan Teknis

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan secara teknis dapat mencapai tujuan. Berdasarkan data dan hasil wawancara kepada tim pelaksana Program Rumah Sejahtera (PRS), program ini sudah berjalan sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 6.077 (enam ribu tujuh puluh tujuh) rumah berdasarkan data dan hasil wawancara dengan Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai

Selatan) program ini ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan harus memperbaiki rumah tidak layak huni sebesar 5.012 unit bantuan.

Namun untuk dapat melihat tingkat kelayakan teknis dari suatu program sangat di pengaruhi oleh beberapa prinsip pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari program ini. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditepatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial) yaitu :

“Dari awal ya, tahapan itu sudah tertuang pada SOP atau JUKNI. Jadi kami bekerja sesuai dan berdasarkan aturan pada SOP dan JUKNIS. Bagi dari segi prinsip pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Namun, pada pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini tidak selamanya berjalan sesuai SOP ada beberapa pelaksanaan yang masih tidak dapat melaksanakan beberapa prinsip seperti prinsip gotong royong dan kesetiakawanan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ana (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Telaga Langsung) yaitu :

“dalam melaksanakan perbaikan rumah kami saya hanya menggunakan jasa tukang tidak ada kegiatan gotong royong sama sekali antar warga mungkin karena mereka pasti sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Pada Prosesnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya sedemikian mungkin agar pada misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak huni, dengan selalu memberikan usaha semaksimal mungkin pada tahapan pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh Lea Indiarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) mengenai proses tahapan yang harus dilaksanakan tim pelaksana Program Rumah Sejahtera (PRS) yaitu :

“Saya jelaskan proses tahapan awal dari pelaksanaan PRS secara singkatnya begini 1) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Program Rumah Sejahtera 2) Mengajukan anggaran kepada Tim Anggaran Kabupaten dalam rangka untuk pelaksanaan Program Rumah Sejahtera 3) Melaksanakan sosialisasi kegiatan Program Rumah Sejahtera 4) Menerima, mengadministrasi dan menverifikasi data usulan calon penerima manfaat dari program 5) Melaksanakan verifikasi lapangan/penjajagan ke lokasi calon penerima bantuan Program Rumah Sejahtera 6) Merekomendasikan individu/keluarga calon penerima manfaat dari Program Rumah Sejahtera 7) Melaksanakan proses pencairan/penyalurkan dana bantuan Program Rumah Sejahtera 8) Membuat laporan kegiatan 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat 10) Melaksanakan monitoring serta evaluasi.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Dalam misi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan ditahun 2023 pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Seperti yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Nordiaansyah (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

“PRS ini tidak hanya menggunakan dana APBD saja tetapi ada dana bantuan dari pihak lain (CSR) seperti Bank Kalsel, Bank BRI dan PLN pernah memberikan dana bantuan kepada KPM dengan nominal yang sama yakni Rp 17.500.000.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Hal yang lain juga disampaikan perihal capaian dari Program Rumah Sejahtera (PRS) yang sudah melebihi harapan yang sudah ditargetkan pada tahun 2014. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nordiaansyah (Kepala Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Program ini sudah mencapai target yang ingin di capai pada tahun 2014 yaitu dengan memperbaiki rumah tidak layak huni sebesar 5.012 unit yang ditargetkan selesai dan kalau melihat

data realisasi PRS sudah ada 6.077 unit rumah yang sudah diperbaiki. Selain itu juga PRS ini mendapatkan sebuah prestasi yang masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2020 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga pada pemerintahan daerah, BUMN dan BUMD.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Jika mengacu pada data rumah tidak layak huni yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 masih terdapat 6.884 bangunan rumah tidak layak untuk di huni. Berikut data bangunan rumah tidak layak untuk dihuni Se Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dapat dicermati pad 4.3 berikut :

Tabel 4. 6 Data RTLH Provinsi Kalimantan Selatan 2023

No	Kabupaten	RTLH
1.	Tanah Laut	439
2.	Kabupaten Kota Baru	2.496
3.	Kabupaten Banjar	2.409
4.	Kabupaten Barito Kuala	8.814
5.	Kabupaten Tapin	580
6.	Kabupaten HSS	6.884
7.	Kabupaten HST	3.982
8.	Kabupaten HSU	2.394
9.	Kabupaten Tabalong	1.887
10.	Kabupaten Tanah Bumbu	3.389
11.	Kota Banjar	4.671
12.	Kota Banjarmasin	497
13.	Kabupaten Balangan	3.273
Provinsi Kalimantan Selatan		41.714

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi KALSEL 2023

Jika mengacu pada data tabel 4.3 diatas maka, dengan masih banyaknya jumlah bangunan rumah tidak layak untuk di huni yang ada di Hulu Sungai Selatan sementara Program Rumah Sejahtera (PRS) yang di targetkan selesai ditahun 2023 tentunya belum terealisasi, karena masih ada bangunan rumah tidak layak untuk di huni sebanyak 6.884 bangunan rumah tidak layak untuk di huni menurut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Jika mengacu pada data diatas maka perlu ada tambahan bantuan sekitar 6.386 unit harus diberi bantuan oleh Pemda pada tahun 2023 guna tercapainya Kabupaten yang layak huni bersamaan pada berakhirnya sebuah Program Rumah Sejahtera (PRS).

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat perbedaan data bangunan rumah tidak layak untuk di huni antar Dinas Sosial dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, perbedaan data tersebut masing-masing memiliki kualifikasi tersendiri dalam menentukan rumah tidak layak huni. Untuk memastikan hal tersebut peneliti bersama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penyisiran kembali terhadap rumah tidak layak huni. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yakni :

“Beda, segmen dan kualifikasi kami adalah kluster paling bawah yang memang dengan kluster kerusakan paling parah. Kalau dari Dispera KPLH itu sifatnya berkelompok. Jadi ya tidak bisa masuk dalam kualifikasi kami namun calon KPM bisa saja dimasukkan dalam program kami.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Berdasarkan hasil temuan peneliti maka kelayakan teknis dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) sebenarnya sudah sepuhni dengan melihat tercapainya target ditahun 2014 yang realisasinya ditahun 2023 walaupun pada pelaksanaannya ada

beberapa prinsip yang tidak terlaksana yakni prinsip gotong royong, kesetiakawanan serta adanya temuan bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) yang tidak tepat sasaran. Padahal proses pelaksanaan pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) harusnya dapat membantu masyarakat miskin yang membutuhkan.

b. Kelayakan Ekonomi dan Keuangan

Indikator ini berkaitan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa manfaat (ekonomi dan sosial) yang akan diperoleh. Kelayakan ekonomi dan keuangan berhubungan dengan masalah pendanaan. Seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2021 total dari sebuah dana bantuan hibah Program Rumah Sejahtera sejumlah Rp 13.908.000 Dengan jumlah bantuan dana tersebut tidak semua masyarakat yang menerima bantuan merasa cukup dalam membangun atau memperbaiki rumahnya untuk menjadi rumah layak huni. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya bisa memperbaiki Sebagian rumah saja, mereka harus melakukan perbaikan sendiri jika ingin memperbaiki secara keseluruhan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Lea Indarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“banyak sekali KPM yang ingin meminta adanya penambahan dana karena perbedaan gaji upah, kayu dan perlengkapan untuk memperbaiki rumah belum lagi yang di daerah rawa yakni kecamatan Daha Selatan, Daha Barat dan Daha Utara yang di mana mereka harus memasang tajak (pondasi kayu yang lebih tinggi) karena daerah sana daerah rawa dan rawan banjir.”
(Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkum Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yakni :

“setelah beberapa tahun kami melaksanakan PRS ini hamper dari semua KPM meminta untuk menambahkan nominal bantuan karena untuk Rp 13.908.000 hanya bisa memperbaiki rumah saja tidak dengan upah tukang sehingga kami dari tim berusaha memperjuangkan untuk nominal penyaluran tersebut agar ditambahkan di tahun 2021.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Nordiiansyah (Kepala Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Saya pada tahun 2021 Bersama tim pelaksana di DPR mengusahakan dan menyampaikan aspirasi terkit dana bantuan PRS ini agar kedepannya di tambahkan karena mengingat di tahun 2021 dengan nominal 13.908.000 sudah tidak cukup lagi dalam memperbaiki kerusakan rumah ditambah upah tukang yang semakin naik.” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Berdasarkan hasil rapat tersebut maka dikeluarkanlah keputusan untuk menambahkan jumlah bantuan dana sebesar Rp 17.500.00 yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rincian yang dapat dicermati pada 4.4 berikut yang disajikan oleh peneliti :

Tabel 4. 7 Rincian Dana Program Rumah Sejahtera (PRS)

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Rumah	11.600,000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan)</i>	11,600,000
2	Peningkatan Kualitas MCK	2,500,000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan MCK)</i>	2,500,000
3	Pendukung	3,400,000

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
	1. Konsumsi Gotong Goyong	400,000
	2. Upah Tukang (Bangunan induk dan MCK)	3.000,000
JUMLAH TOTAL		Rp. 17.500.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bantuan hibah yang dulunya sebesar Rp 13.908.00 menjadi 17.500.000 pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3.592.000 yang diperuntukkan untuk membayar gaji sebuah tukang yang semakin tahun naik dan makanan gotong royong agar proses pembangunan Program dapat berjalan dengan lancar. Mengingat dana yang diberikan sebesar Rp 17.500.000 diperuntukkan hanya untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak saja. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lea Indiarti (Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“jadi dana yang dihibahkan sebesar Rp 17.500.000 itu hanya untuk memperbaiki rumah yang rusak saja, kalau ada uang sisa baru bisa dipergunakan ke lain seperti membuat WC dll kami pun sudah memberikan rincian dana yang nantinya akan menjadi pedoman KPM dalam memperbaiki rumahnya yang rusak.” (Hasil wawancara tanggal 25 september 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Riduansyah (Subkunjaman Sosial Dinas Sosial) yaitu :

“pada waktu Bimtek kami sudah menjelaskan kepada KPM bahwa dana Rp 17.500,000 hanya cukup untuk memperbaiki rumah saja tidak untuk membangun rumah baru jadi saya Bersama tim pelaksana selalu mengingatkan kepada KPM mengenai pengelolaan dana bantuan tersebut agar

dipergunakan sesuai dengan SOP dan JUKNIS.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Sedangkan untuk melihat kelayakan ekonomi dan keuangan berkaitan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa manfaat (ekonomi dan sosial) yang akan diperoleh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Marjuki (Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Kalumpung Kalumpung) bahwa dana Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sangat cukup untuk memperbaiki rumahnya yang rusak yakni :

“dana PRS itu sangat-sangat cukup malah ada uang kemabli yang bisa membangun WC di belakang rumah yang dulunya kamar mandi kita di Sungai (jamban) kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah dan tim pelaksana yang sudah membantu kami dalam proses perbaikan rumah.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rani (Keluarga Penerima Manfaat Telaga Langsung) terkait kecukupan dana Program Rumah Sejahtera (PRS) ini yaitu :

“sangat cukup sekali dengan uang yang diberikan kepada keluarga kami yakni Rp 17.500.000 malah kami juga mampu untuk membeli perlengkapan tempat tidur dengan menggunakan uang sisa.” (Hasil wawancara tanggal 1 September 2023)

Dengan dana bantuan sebesar Rp 17.500.000 mampu memperbaiki bangunan sebuah rumah warga yang pada dulunya tidak layak untuk dihuni menjadi layak untuk dihuni yang dapat dicermati pada 4.3 disajikan oleh peneliti :

Gambar 4. 4 Perbaikan Rumah



Sumber : Temuan peneliti

Hasil dokumentasi dari peneliti merupakan gambaran keadaan rumah sebelum dan sesudah Keluarga Penerima Manfaat dari Program Rumah Sejahtera (PRS) dengan menggunakan bantuan dengan total Rp. 17.500.000, dalam memperbaiki keadaan rumah yang rusak.

Berdasarkan sajian dari hasil penelitian yang diuraikan , maka kelayakan dari segi ekonomi dan keuangan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sudah layak karena program ini memiliki prinsip dan tujuan yang memang diharapkan agar masyarakat menggunakan dana sehemat mungkin dan melakukan perbaikan di bagian rumah yang rusak saja selain itu juga keadaan rumah warga

sebelum dan sesudah juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

c. Pengoperasian Administratif

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan dapat dilaksanakan (dengan ketersediaan SDM, fasilitas, dan waktu yang ada). Pelaksanaan Program dibantu oleh potensi desa yaitu Samping Desa yang tersebar di seluruh Kecamatan dan disetiap desa memiliki 1 Samping Desa yang siap memfasilitasi masyarakat terkait pelayanan pada di Dinas Sosial. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nordiaansyah (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yaitu :

“Dalam pelaksanaan PRS ini kami sangat terbantu dan terwakilkan sekali oleh SDM kami yakni Samping Desa yang ada di seluruh desa yang berjumlah 114 baik dari tahapan verifikasi sampai dengan tahapan pelaporan dan evaluasi.”
(Hasil wawancara tanggal 27 September 2023)

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapa Riduansyah (Subkun Jaminan Sosial Dinas Sosial)

“walaupun disetiap desa mempunyai 1 Samping Desa karena banyaknya tugas serta tuntutan kerja mereka yang banya dalam pelaksanaannya sering terjadi kecolongan seperti adanya KPM membeli bahan perbaikan rumah dengan kualitas rendah dengan alasan untuk menghemat uang dan ada juga ditemukan KPM yang tidak menggunakan jasa tukang dengan alasan yang sama.” (Hasil wawancara tanggal 25 September 2023)

Samping Desa pada tugasnya memiliki peranan penting dalam proses pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahap verifikasi sampai dengan evaluasi. Karena keterbatasan dan banyaknya jumlah pelayanan yang ada di Desa membuat Samping

Desa Kewalahan dalam mengatur waktu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Latifah (Samping Desa Kecamatan Sungai Raya) yaitu :

“saya dan teman-teman samping desa lain sering sekali kecolongan terhadap KPM mengingat banyak nya tugas kami di desa kami di tim Kecamatan biasanya juga saling bahu membahu dalam tugas monitoring walapun demikian tetap saja terjadi kecolongan dengan alasan karena lupa dan lain berbagai hal.” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2023)

Dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak terlepas dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya program. Kendala yang ditemukan seperti kurangnya ketersediaan tukang yang menyebabkan keterlambatan proses pengerjaan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Basrah (Keluarga Penerima manfaat Kecamatan Kandangan) yaitu :

“setelah uang cair kami harus menunggu tukang 2 minggu untuk dapat membantu suami saya dalam memperbaiki rumah sehingga dalam perbaikan rumah saya kemaren ada keterlambatan waktu kalau tidak salah 1 bulan 2 minggu.” (Hasil wawancara tanggal 3 September 2023)

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti, indikator pengoperasian administratif tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti Kurangnya sumber daya samping desa yang mengakibatkan adanya KPM yang tidak tepat sasaran dan Kurangnya ketersediaan tukang yang tidak hanya berdampak pada keterlambatan proses pembangunan rumah, tetapi juga menyebabkan petugas tidak dapat menyelesaikan laporan tepat waktu.

1.2 Permasalahan yang di hadapi dalam Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS)

Berdasarkan temuan peneliti dalam Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera tidak terlepas dari masalah yang terjadi baik itu kepada tim pelaksana maupun KPM yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengawasan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yang dilaksanakan oleh tim pelaksana yaitu Samping Desa sebagai tim yang memfasilitasi masyarakat di desa baik dari tahap pengajuan proposal, verifikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Samping Desa berjumlah 114 pada tahun 2023 yang tersebar di seluruh desa, banyaknya tugas dan fungsi Samping Desa berdampak pada tidak terawasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada proses perbaikan rumah sehingga adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ingin menghemat uang bantuan hibah perbaikan rumah, sampai nekat tanpa menggunakan jasa tukang dan membeli bahan bangunan yang murah.

2. Tidak Terlaksananya Beberapa Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini memiliki beberapa prinsip untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip yang belum terlaksana yaitu prinsip gotong royong dan prinsip kesetiakawanan yang berakibat pada Penerima Manfaat hibah yang harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar jasa tukang.

3. Keterbatasan SDM Tukang

Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak terlepas dari Tertundanya proses perbaikan rumah dikarenakan kurangnya ketersediaan tukang yang berakibat pada keterlambatan proses perbaikan rumah dari target yang sudah ditentukan. Mengingat proses pembangunan Program Rumah Sejahtera bersamaan dengan sebuah

Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mengharuskan KPM untuk mengumpulkan laporan selambat-lambatnya 45 hari setelah dana hibah cair.

